

## KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## SUB KATEGORI

Kependudukan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Penduduk Laki-laki yang Tidak Tamat SMA

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah penduduk laki-laki yang tidak tamat SMA** adalah banyaknya orang laki-laki yang tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMA di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- **Laki-laki yang tidak tamat SMA** adalah semua penduduk laki-laki yang tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir jenjang pendidikan SMA di sekolah negeri maupun swasta dengan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.
- **SMA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.
- Menurut Permendagri No. 54 tahun 2010, jenjang pendidikan berdasarkan kelompok usia SMA adalah 16-18 tahun.

## RUJUKAN

- Permendagri No. 54 tahun 2010
- Permendagri No. 86 tahun 2017

## RUMUS

Angka Putus Sekolah (APS) SMA untuk Laki-laki

Jumlah capaian kinerja APS SMA untuk laki – laki di satu Kabupaten dan Kota

Jumlah seluruh APS SMA untuk laki – laki di satu Kabupaten dan Kota  $\times 100\%$

### Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah terlebih dahulu mengetahui capaian kinerja APS SMA untuk laki-laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap kedua dilakukan dengan mendata jumlah capaian kinerja APS SMA untuk laki-laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap ketiga adalah mendata jumlah seluruh APS SMA untuk laki-laki se-Kabupaten dan Kota.
- Tahap terakhir yaitu dengan membagi perolehan data kuantitatif pada tahap kedua dengan tahap ketiga, selanjutnya dikali dengan 100%.

## WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## UKURAN

Persen (%)

## UNIT

-

## KEGUNAAN

1. Mengetahui gambaran umum mengenai jumlah penduduk tidak tamat SMA berdasarkan jenis kelamin;
2. Penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lapangan usaha dimana dengan informasi pendidikan yang dimiliki penduduk, pemerintah akan lebih dapat menyediakan lapangan usaha yang sesuai dengan pendidikan penduduk umumnya berdasarkan jenis kelamin;
3. Mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) dikaitkan dengan program kebijakan lainnya seperti bidang kesehatan, penuntasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan.

## INTERPRETASI

Nilai angka penduduk putus SMA untuk laki-laki berkisar antara 0-100%. Semakin sedikit jumlah ijazah/STTB SMA yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk laki-laki di suatu wilayah, maka semakin tinggi persentase penduduk putus SMA untuk laki-laki. Dalam hal ini mencerminkan adanya kejadian penduduk laki-laki yang putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat semakin banyak, artinya bahwa tingkat pencapaian sebagian besar penduduk laki-laki di suatu wilayah banyak yang tidak mencapai jenjang pendidikan tamat SMA

## KETERANGAN

**Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan** adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.

## SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul modul Sosial Budaya dan Pendidikan

## METODOLOGI

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut

heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.

3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami, atau anggota rumah tangga lain yang berjenis kelamin laki-laki yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

BPS RI

## **DOKUMEN**

SIPD

